

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Performance Kinerja Perusahaan Manufaktur

1. Definisi Performance Kinerja Perusahaan

Adalah suatu penentuan tentang ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan pada suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Nur'aeni, 2010). Karenanya kinerja merupakan suatu hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan.

Pengertian performance dalam organisasi merupakan jawaban atas berhasil maupun tidaknya tujuan organisasi yang ditetapkan. Performance perusahaan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Sebagai contoh, pelaksana perusahaan seperti keterpisahan antara peran pengawas dan pelaksana operasional, serta kontrol dari pihak luar atau ketiga, dan sebagainya.

Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing measuremen yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau ke efektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi (Hanafi, 2003). Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha atau hasil kerja seseorang atau tim baik perusahaan dll yang dilaksanakan untuk melakukan pencapaian atau prestasi yang ditargetkan. Secara

formal, pembahasan terakhir dari hasil pengukuran kinerja telah diwujudkan dalam suatu laporan yang kita kenal dengan istilah laporan kinerja.

Selain itu, pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menghambat perilaku yang tidak diinginkan, guna untuk menegakkan perilaku yang diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja.

2. Rasio Indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan manufaktur

Dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan adalah dengan cara memiliki kekayaan atau aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yg telah dicapai.

3. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Manufaktur

- a) Dukungan Organisasi
- b) Fungsi Manajemen
- c) Dukungan Kinerja

2.1.2 Teori-Teori *Corporate Governance*

Syakhroza (2003) menyatakan tentang teori *Corporate Governance* dapat diformulasikan dalam model *Corporate Governance* yang bersifat utama seperti *finance model*, *stewardship model*, *stakeholders model* atau *political model* serta *myopic market model*.

Ketika perusahaan berkembang menjadi besar, maka pemegang saham semakin tersebar, dan semakin banyak *agency cost* yang terjadi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) potensi konflik bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan atau antara pemegang saham dengan kreditur.

Pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur dan mengontrol kinerja suatu perusahaan manufaktur agar tidak menyimpang. Dalam situasi tertentu, kinerja perusahaan manufaktur memungkinkan untuk menggunakan *Corporate Governance* membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding costs*) yang berfungsi sebagai penjamin. Dan *Corporate Governance* tidak akan bertindak merugikan prinsipal malah untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi masih bisa terjadi perbedaan antara keputusan-keputusan perusahaan manufaktur dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan kinerja perusahaan. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan *residual loss*.

Teori *Good Corporate* ini sangatlah sulit untuk diterapkan dan banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*, yang menengenai masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul, sehingga berkembanglah suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan kepemilikan dan

pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan manufaktur, yang dikenal dengan konsep *Corporate Governance*.

Stewardship model mengasumsikan tentang manajer ialah pelayan perusahaan yang baik serta rajin dalam bekerja untuk mencapai tingkatan keuntungan dan tingkatan pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab.

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders dengan menciptakan barang dan jasa. Dalam model ini *Corporate Governance* merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukan cek dan keseimbangan mekanisme guna untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal maupun eksternal.

2.1.3 Pengertian *Corporate Governance*

(*OECD*) *Organization Economic Cooperation and Development* berpendapat bahwa *Corporate Governance* adalah sebagai struktur hubungan serta tanggungjawab di antara pihak-pihak yang terkait yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.

Definisi monks (2003) *Corporate Governance* adalah sebagai suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang juga tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* lain.

Sementara itu *Cadbury Committe* dari Inggris seperti yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai aturan-aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal dengan hak dan tanggungjawab, ataupun sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ada paling sedikit dua hal yang telah ditekankan dalam konsep ini ialah pentingnya hak pemegang saham untuk *Corporate Governance* memperoleh suatu informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

2.1.4 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

OECD mengembangkan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, atau yang lebih dikenal publik sebagai *The OECD Principles Of Corporate Governance*.

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* meliputi :

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi), adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses pengambilan keputusan dan keterbukaan untuk mengemukakan informasi materil dan relevan tentang perusahaan.

- 2) *Accountability* (akuntabilitas) adalah bentuk atas kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana efektif.
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Independency* (kemandirian), adalah keadaan dimana perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan dengan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), adalah hal atau perlakuan yang adil yang setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kaihatu, 2006).

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan *OECD* menyatakan bahwa kerangka kerja *Corporate Governance* seharusnya :

1. Memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama.
2. Melindungi hak pemegang saham .
3. Mengakui hak-hak *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan konsep *Corporate* yang baik.

4. Mengungkapkan seluruh hal yang material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk *Corporate Governance* kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan; serta .
5. Memastikan panduan strategik perusahaan, pengawasan manajemen oleh dewan yang efektif dan pertanggungjawaban dewan kepada perusahaan manufaktur dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *frame work* bagi penerapan *Good Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengolaborasi best practices bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.5 Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut FCGI (2001)

- a) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
- b) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- c) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.
- d) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan menurut *IICG* (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *Good Corporate Governance* adalah:

- 1) Meminimalkan *cost of capital* Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya *Corporate Governance* modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
- 2) Meminimalkan *agency cost*. Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 3) Mengangkat citra perusahaan *Citra* perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. *Citra (image)* suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.
- 4) Meningkatkan nilai saham perusahaan Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel

Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

2.1.6 Mekanisme *Governance*

Mekanisme penerapan *Corporate Governance* ada dua yaitu mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme tersebut berguna menyelesaikan konflik agensi yang terjadi di perusahaan. Mekanisme intern berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan seperti Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing.

Mekanisme ekstern merupakan suatu mekanisme kontrol yang memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan, baik ekonomi, hukum serta sosial agar dapat mengontrol alur perusahaan untuk dapat sesuai dengan keinginan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Sidharta dan Cynthia, 2003). Perangkat tersebut meliputi pasar uang dan pasar modal yang bersaing, perangkat hukum dan perundang-undangan yang lengkap, penegakan hukum yang adil, pasar barang dan jasa yang aktif dan terbuka serta konsumen yang aktif dan sadar akan hak dan kewajibannya. Mekanisme ini lebih berperan untuk mendisiplinkan manajer dibandingkan mekanisme intern, karena mekanisme tersebut lebih mempunyai kekuatan dan pengaruh *Corporate Governance*.

2.1.7 *Corporate Governance* di Indonesia

Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan *Corporate Governance* akan terus dilakukan, dan mengingat posisi Indonesia dalam hal ini masih sangat memprihatinkan. Survey tahun 1999 yang dilakukan Price Water House Coopers dengan responden investor institusional di Singapura menunjukkan akan praktek *Corporate Governance* di Indonesia masih terbelang rendah.

Sementara hasil survey *Corporate Governance Watch* 2007 yang dikeluarkan oleh CLSA Asia Pasific Markets suatu investment group independen di Hong Kong, menempatkan Indonesia pada posisi terendah bersama Philipina dari 11 pasar Asia yang disurvei, dengan kelemahannya pada peraturan, praktik, penegakkan, akuntansi, budaya *Governance* dan lingkungan politik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang dan mewujudkan *GCG*. Pada tahun 1999 Pemerintah membentuk *Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)* yang kemudian pada November 2004 berganti nama menjadi *Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)*, yang lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan *Governance* di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Komite ini memiliki fungsi untuk memprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia.

Pertama, regulasi yang dikeluarkan regulator (pemerintah) akan mendukung peraturan-peraturan pokok yang ada di perusahaan, karena peraturan yang dibuat

oleh pendiri perusahaan atau pemegang saham bersifat subyektif dan tidak efisien dan tidak mungkin dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat sehingga dengan regulasi yang ada dapat mencapai persetujuan yang komprehensif.

Kedua, walaupun perusahaan pada awalnya memiliki hak untuk mendesain peraturan yang efisien, mereka mungkin ingin membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari, masalah akan timbul ketika perusahaan tidak memiliki komitmen untuk tidak mengubah atau membatalkan peraturan yang telah dibuatnya. Ketika pemegang saham tersebar dan tidak terlibat aktif dalam perusahaan hal itu mungkin terjadi bahwa manajemen mengubah aturan untuk kepentingannya sendiri.

Pada tahun 2001 *KNKCG* telah berhasil menerbitkan pedoman praktik *Code of Good Corporate Governance*. Adapun swasta juga turut berperan dalam mengembangkan *Corporate Governance* ini, dengan membentuk organisasi non-pemerintah seperti *Forum for Corporate Governance for Indonesia (FCGI)* pada tahun 2000, *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Corporate Leadership Development in Indonesia (CLDI)*, dan *Indonesian Institute of Independent Commissioners (IIIC)*..

Berkaitan dengan *Corporate Governance* perusahaan publik di Indonesia paling tidak terdapat dua peraturan yang terkait, yaitu undang-undang perseroan dan undang-undang di pasar modal.

2.2 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1
Peneliti Terdahulu.

| No. | Penelitian | Judul | Hasil penelitian |
|------------|--|---|--|
| 1. | Cinta Yuniarti 2014 | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja dan nilai perusahaan pada perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. | Good Corporate juga berpengaruh terhadap daya kinerja serta hasil dari suatu niai perusahaan high profile yang terdatar pada BEI telah efektif. |
| 2. | Dewi Saptantianah Puji Astuti 2004 | Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba di Seputar Right Issue. | Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusi, kepemilikan manajemen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 3. | Eka Sefiana 2009 | Pengaruh Penerapan Cororate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Go Public di BEI. | Proporsi Komisaris Independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 4. | Gideon SB. Boediono 2005 | Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. | Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 5. | Hikmah Is'ada 2013 | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. | Manajemen laba pada perusahaan yang telah terdaftar di BEI menunjukkan angka signifikan. |
| 6. | Indra Dewi Suryani 2010 | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di (BEI). | Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. |
| 7. | Izzati Amperaningrum dan Intan Komala Sari 2013 | Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). | Ada pengaruh signifikan antara leverage terhadap manajemen laba. Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. |
| 8. | Kadek Emi Kristiani, Ni Luh gede Erni Sulindawati 2014 | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. | Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, Ada pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 9. | Khairaningrum Mulyanti, M.Pd 2015 | Peran Akuntan Manajemen Dalam Penerapan Good Corporate Governance. | Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. |
| 10. | Midiastuty dan Machfoedz 2003 | Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. | Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. |
| 11. | Norman Mohd Saleh dan Aida Hazlin Ismail 2019 | The Role of Audit Quality and Corporate Governance in Mitigating Earnings Management for Malaysian IPO Companies. | Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Independensi komite audit dan jumlah dewan direksi berpengaruh. |
| 12. | Robert Jao dan Gagaring Pagalung 2011 | Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan manufaktur Indonesia. | Ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba dan Leverage berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. Perusahaan mempunyai hubungan negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Leverage tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 13. | Sugeng Pamudji dan Aprillya Trihartati 2010 | Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. | Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Keahlian, frekuensi pertemuan, dan komitmen waktu komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 14. | Welvin I Guna dan Arleen Herawaty 2010 | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. | Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit independen, komisaris independen, dependensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Leverage, kualitas auditor, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. |

Sumber : Peneliti terdahulu

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan elemen *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan sebagai berikut:

1) Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan

Dalam survey opini investor secara global meliputi beberapa investor institusional yang pertama kali dilakukan pada tahun 2000 dan di update pada tahun 2002, Mc Kinsey menemukan bahwa 80% responden bersedia membayar lebih untuk perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang baik. Mereka mendefinisikan perusahaan dengan *Good Corporate Governance* yang baik sebagai perusahaan yang:

- a) Memiliki dewan komisaris yang hampir sebagian besar berasal dari pihak luar.
- b) Yang tidak memiliki hubungan manajemen.
- c) Melakukan evaluasi formal bagi direktur-direktornya.
- d) Responsif terhadap permintaan investor mengenai informasi dan isu-isu pengelolaan perusahaan.

Ukuran kesediaan pembayaran premium yang bersedia dilakukan sangat bervariasi untuk tiap pasar, dari 11% bagi perusahaan-perusahaan Kanada sampai 40% untuk perusahaan-perusahaan di mana kebijakan hukum lebih tidak stabil terutama di Morocco, Mesir, dan Rusia. Jumlah literatur penelitian empiris saat ini juga menunjukkan bahwa banyak studi yang dilakukan untuk mengukur pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap performance kinerja perusahaan. Kelompok pertama melaporkan hasil-hasil temuan yang meragukan Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur.

2) Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diakibatkan rendahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah (down) dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang

sangat menyimpang dari norma tata kelola perusahaan yang baik (Murtanto, 2005).

Hadirnya *Good Corporate Governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi hal mutlak yang diperlukan, mengingat *Good Corporate Governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi (Hastuti, 2005). Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah ketidak selarasan kepentingan salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan.

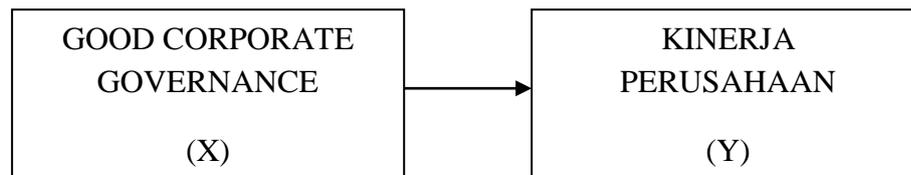
Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dey Report (1994) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham. *FCGI* merumuskan tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Good Corporate Governance yang mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, saerta akuntabilitas diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan.

Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan Nilai Perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor.

TABEL 2.2

Bagan Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis pada suatu penelitian adalah cara atau langkah ketiga dalam suatu penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir atau kerangka penelitian. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2017:105).

Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan sifat keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran (Rianto, 2017:294). Dengan adanya *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan akan membuat perusahaan meningkatkan kinerjanya

dengan baik melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Tidak hanya itu adanya *Good Corporate Governance* juga berguna untuk mengatur pengelolaan *Good Corporate Governance* (X) dan (Y) Kinerja Perusahaan serta tata pengawasan didalam perusahaan untuk mendapatkan dan memberikan kinerja perusahaan yang baik khususnya dalam keuntungan perusahaan.

Metia & Yulius (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas maka hipotesis yang di dapat adalah sebagai berikut :

H = *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

